

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Myrtaferae Kananga, SE., M.AP., CCMS.

PBJ DESA

MUDAH & AMAN

LANGKAH DEMI LANGKAH SESUAI
PERPRES 46/2025 DENGAN
10 SOP KUNCI

PBJ DESA MUDAH & AMAN

**Langkah Demi Langkah Sesuai Perpres 46/2025
dengan 10 SOP Kunci**

**Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.
Myrtaferae Kananga, SE., M.AP., CCMS.**



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PBJ DESA MUDAH & AMAN

Langkah Demi Langkah Sesuai Perpres 46/2025 dengan 10 SOP Kunci

*Copyright @2025 Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP. dan
Myrtaferae Kananga, SE., M.AP., CCMS.*

All right reserved

Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.
Myrtaferae Kananga, SE., M.AP., CCMS.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Merry Nia Irawati, M.Pd.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-524-6

Cetakan ke-1, Juli 2025
15,5 x 23 cm, x + 162 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Kata Pengantar

Menavigasi Amanah, Mengukir Kemandirian

Di jantung pembangunan Indonesia saat ini, denyutnya terasa paling kencang di ribuan desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Amanah besar berupa Dana Desa telah mengalir, membawa harapan untuk kemajuan, pemerataan, dan kesejahteraan. Namun, di balik potensi luar biasa ini, kami memahami ada sebuah kegelisahan yang kerap tak terucap di benak para garda terdepan pembangunan desa. Kegelisahan itu bernama Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Bagi banyak Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), PBJ seringkali terasa seperti sebuah labirin yang rumit dan penuh risiko. Di satu sisi, ada tuntutan untuk merealisasikan pembangunan dengan cepat dan tepat. Di sisi lain, ada tumpukan regulasi yang kompleks dan bayang-bayang potensi kesalahan administrasi yang bisa berujung pada masalah hukum. Rasa khawatir salah langkah, bingung menafsirkan aturan, hingga takut terjatuh dalam praktik yang tidak semestinya telah menjadi beban yang menghambat langkah. Berangkat dari kegelisahan inilah, buku "PBJ Desa Mudah & Aman" kami hadirkan di hadapan Anda. Ini bukanlah sekadar buku teori atau kumpulan pasal-pasal peraturan. Buku ini kami

rancang sebagai sebuah peta jalan, sebuah kompas praktis yang akan memandu Anda melintasi setiap kelokan proses pengadaan dengan percaya diri dan aman. Kami percaya bahwa kunci dari pengadaan yang akuntabel bukanlah dengan menambah kerumitan, melainkan dengan menyederhanakannya menjadi langkah-langkah yang logis, terukur, dan mudah diikuti. Melalui kerangka 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) Kunci yang menjadi inti dari buku ini, kami menerjemahkan bahasa regulasi yang kaku menjadi alur kerja yang aplikatif. Mulai dari merencanakan pengadaan bersama warga di balai desa, hingga mengumumkan hasilnya di papan pengumuman, semua kami urai secara gamblang, langkah demi langkah. Lebih dari sekadar perisai hukum, buku ini adalah sebuah alat untuk transformasi. Kami ingin menggeser paradigma PBJ dari sekadar rutinitas belanja yang membebani menjadi instrumen strategis yang memberdayakan. Pengadaan yang dikelola dengan baik bukan hanya menghasilkan jalan beton atau gedung serbaguna, tetapi juga menumbuhkan gotong royong, memperkuat kapasitas lokal, dan membangun fondasi tata kelola yang transparan dan dipercaya oleh masyarakat. Buku ini kami persembahkan untuk para pejuang pembangunan di tingkat desa: para Kepala Desa yang memegang amanah, para Perangkat Desa yang menjadi motor penggerak administrasi, para anggota TPK yang bekerja di lapangan, serta para pendamping dan pegiat desa yang tak kenal lelah mengawal kemajuan. Mari bersama-sama kita bebaskan diri dari rasa khawatir dan mulai mengukir kemandirian desa melalui pengadaan yang modern, akuntabel, dan berdaya ungkit. Selamat membaca, selamat bekerja, dan selamat membawa desa menuju masa depan yang lebih cerah.

Hormat kami,

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Myrtaferae Kananga, SE., M.AP., CCMS.





QR Code Kumpulan Kertas Kerja Buku PBJ Desa Mudah dan Aman

Dengan mengakses QR Code ini, Anda menyetujui bahwa:

1. **Penggunaan Eksklusif:** QR Code ini mengandung materi yang hanya boleh diakses dan digunakan oleh pembeli buku "PBJ Desa Mudah dan Aman". Hak akses ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan.
2. **Larangan Penyebarluasan:** Anda dilarang untuk menyebarluaskan, membagikan, atau mengizinkan pihak lain mengakses isi QR Code ini tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis buku.
3. **File pada QR Code ini** hanya diizinkan untuk di download, dilarang untuk di edit isinya pada link, silahkan anda download terlebih dahulu kemudian silahkan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk penggunaannya
4. **Sanksi Hukum:** Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya serta peraturan hukum yang berlaku di

Republik Indonesia. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, sanksi pidana dan/atau denda atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya.

5. Pertanggungjawaban: Anda bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan QR Code ini, baik yang dilakukan oleh Anda maupun pihak ketiga yang memperoleh akses melalui Anda.
6. Dengan menggunakan QR Code ini, Anda menyatakan pemahaman dan persetujuan atas semua ketentuan yang telah dijelaskan.



SCAN ME



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
QR Code Kumpulan Kertas Kerja Buku PBJ Desa Mudah dan Aman	v
Daftar Isi	vii
BAGIAN 1 Mengapa Pengadaan di Desa Begitu Penting?	
Fondasi Tata Kelola yang Kuat.....	1
Bab 1 Dana Desa dan Nadi Pembangunan: Mengapa Pengadaan di Desa Begitu Krusial?	3
Bab 2 Labirin Regulasi PBJ Desa: Memahami Kerangka Hukum dari Pusat ke Lokal	11
BAGIAN 2 Fondasi Solusi: Mengapa SOP Menjadi Kunci?	19
Bab 3 Gap Implementasi: Mengapa Aturan Saja Tidak Cukup? Urgensi Panduan Operasional di Lapangan.....	21
Bab 4 Revolusi Mikro: Mengenal Kerangka 10 SOP Kunci untuk Pengadaan Desa Akuntabel	23
BAGIAN 3 Mengurai Implementasi Konkret: Panduan Rinci 10 SOP Kunci Pengadaan Desa.....	29
Bab 5 SOP 1: Memulai dengan Peta Jalan: Perencanaan Pengadaan yang Partisipatif.....	32

Bab 6 SOP 2: Merajut Kemandirian: Persiapan Pengadaan Swakelola oleh Komunitas Lokal	38
Bab 7 SOP 3: Menyiapkan Mitra Terbaik: Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia yang Kompeten	44
Bab 8 SOP 4: Gotong Royong dalam Aksi: Pelaksanaan Swakelola yang Efisien dan Transparan	50
Bab 9 SOP 5: Memilih Mitra Pembangunan: Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia (Pembelian Langsung & Metode Lain).....	55
Bab 10 SOP 6: Mata Elang Akuntabilitas: Pengendalian Pelaksanaan untuk Memastikan Kualitas.....	62
Bab 11 SOP 7: Menutup Siklus dengan Rapi: Pelaporan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.....	68
Bab 12 SOP 8: Memenuhi Hak dan Kewajiban: Mekanisme Pembayaran yang Akuntabel.....	74
Bab 13 SOP 9: Merawat Harmoni di Desa: Penyelesaian Perselisihan Secara Kekeluargaan	81
Bab 14 SOP 10: Transparansi Tanpa Henti: Pengumuman Pengadaan untuk Informasi Publik.....	87
BAGIAN 4 Dampak Lebih Luas: Transformasi Tata Kelola Desa	93
Bab 15 Database Pengadaan: Dari Tumpukan Kertas Menjadi Sumber Intelijen Pembangunan Desa.....	102
Bab 16 Membentengi Desa dari Risiko: SOP sebagai Perisai Hukum dan Integritas.....	105
Bab 17 Membebaskan Kepala Desa: Fokus Strategis Berbasis Data Akuntabel.....	107
BAGIAN 5 Implementasi dan Langkah ke Depan.....	111
Bab 18 Peran Vital Pemerintah Kabupaten/Kota: Katalisator Transformasi Pengadaan Desa	112
Bab 19 Langkah Konkret Implementasi: Panduan Praktis Menyusun dan Menerapkan SOP di Desa	115
Bab 20 Epilog: Menuju Desa Mandiri Melalui Pengadaan yang Modern dan Berdaya Ungkit.....	118

BAGIAN 6 Lampiran dan Indeks121
 Lampiran 122
BAGIAN 7 Penawaran Jasa Penyusunan Peraturan dan SOP
Pengadaan125
 Kerangka Acuan Kerja (Kak) 137
Daftar Kutipan149
Profil Penulis.....159



Daftar Kutipan

Peran Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 - DJPb, diakses Mei 4, 2025, <https://djp.b.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekon>

Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun, diakses Mei 4, 2025, <https://jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/download/275/236/1849>

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 - *Cipta Desa*, diakses Mei 4, 2025, <https://ciptadesa.com/lampiran-permendagri-114-tahun-2014/>

kata pengantar - Temanku LKPP, diakses Mei 4, 2025, https://temanku.lkpp.go.id/media/docs/docs_62860308ab361.pdf

Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Provinsi Suma, diakses Mei 4, 2025, <https://ppid.sumutprov.go.id/front/dokumen/download/300151323>

perencanaan keuangan pembangunan desa indikator alat kaji menentukan status kemajuan dan kemandirian desa - Detail Interest Area | IAI Jawa Timur, diakses Mei 4, 2025, <https://iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/9>

Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Merespon Masalah Kemiskinan di Indonesia Ajie Hanif Muzaqi 1), Djoko Susanto 2), M. Daimul, diakses Mei 4, 2025, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/download/4847/2762/>

Kementerian Keuangan Umumkan Desa Penerima Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2024, Termasuk Desa Bancak, diakses Mei 4, 2025, <https://www.bancak.id/artikel/2024/9/5/kementerian-keuangan-umumkan-desa-penerima-alokasi-kinerja-dana-desa-tahun-2024-termasuk-desa-bancak>

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, diakses Mei 4, 2025, <https://www.bimtekdiklat.co.id/bimtek-pengadaan-barang-dan-jasa-di-desa/>

Pengadaan Barang & Jasa Desa: Praktik Terbaik Untuk Peningkatan Pelayanan Desa, diakses Mei 4, 2025, <https://www.panda.id/pengadaan-barang-dan-jasa-desa/>

Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa sesuai Aturan LKPP Terbaru - Putatgede, diakses Mei 4, 2025, <https://putatgede.kendalkab.go.id/kabardetail/SWhBN1Z0THhiWTRZaHp5eWNVa0JSdz09/tata-cara-pengadaan-barang---jasa-di-desa-sesuai-aturan-lkpp-terbaru.html>

tata cara pengadaan barang dan jasa di desa berdasarkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan pemerintah nomor 12 tahun 2019 - BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, diakses Mei 4, 2025, https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/03/TH_2024_PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA-DI-DESA_Final.pdf

Salah Guna Dana Desa, Apa Solusinya? Misuse of Village Funds, What is the Solution?, diakses Mei 4, 2025, <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/download/1018/pdf>

pengadaan barang dan jasa dana di desa, diakses Mei 4, 2025, <https://kalsel.bpk.go.id/easy/doc/TULISANHUKUM/PBJ-Dana-Di-Desa-HST.pdf>

The Effort to Eradicate Corruption Crimes in The Procurement Of Goods And Services In Indonesia Upaya Penanggulangan Tindak Pidana - The Prosecutor Law Review - Kejaksaan Agung, diakses Mei 4, 2025, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/download/65/39/172>

Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang & Jasa - ACLC KPK, diakses Mei 4, 2025, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>

Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat COVID-19-ICW, diakses Mei 4, 2025, <https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dan-akuntabilitas-pengadaan-barang-dan-jasa-saat-covid-19>

Akuntabilitas Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa : Studi Kasus Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon - Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, diakses Mei 4, 2025, <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/222/157/>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa - JDIIH INSPEKTORAT, diakses Mei 4, 2025, https://jdiihinspektorat.kaboki.go.id/assets/upload/Peraturan_Menteri_Dalam_Negeri_Nomor_20_Tahun_2018_tentang_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pdf

Cegah Korupsi dan Kecurangan, LKPP Dorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diakses Mei 4, 2025, <https://www.lkpp.go.id/read/s/cegah-korupsi-dan-kecurangan-lkpp-dorong-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah>

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Elektronik

- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di LKPP - *Jurnal Institut Transportasi dan Logistik Trisakti*, diakses Mei 4, 2025,
<https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jstl/article/download/1262/pdf>
- Analisis Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*, diakses Mei 4, 2025, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/21773/16827/86488>
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021, diakses Mei 4, 2025,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>
- Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Sebagaimana Telah, diakses Mei 4, 2025,
https://riau.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Matriks-Perbandingan-Perubahan-Perpres-16-Tahun-2018_-Pengadaan-Barang-Jasa-Pemerintah.pdf
- lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah* - siukpbj lkpp, diakses Mei 4, 2025,
https://siukpbj.lkpp.go.id/uploads/posts/2021_06_11_Peraturan%20Lembaga%20Nomor%2012%20Tahun%202021_1824_1.pdf
- Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pemilihan Penyedia Dini* - Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa - christiangamas.net, diakses Mei 4, 2025, <https://christiangamas.net/percepatan-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-melalui-pemilihan-penyedia-dini/>
- Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia* - JDIH LKPP, diakses Mei 4, 2025,

<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-4-tahun-2024>

Peraturan Baru Mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Kota Banjarbaru, diakses Mei 4, 2025, <https://ulp.banjarbarukota.go.id/peraturan-baru-mengenai-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/>

[peraturan.bpk.go.id](https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-12-tahun-2019), diakses Mei 4, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/150665/Peraturan%20LKPP%20Nomor%2012%20Tahun%202019.pdf>

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Kertajaya Dajah Terlengkap, diakses Mei 4, 2025, <https://kertajayadajah.web.id/artikel/2023/9/19/pedoman-pengadaan-barang-dan-jasa-di-desa-kertajaya-dajah-terlengkap>

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa - JDIH LKPP, diakses Mei 4, 2025, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-12-tahun-2019>

Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, diakses Mei 4, 2025, https://kec-rowokele.kebumenkab.go.id/index.php/web/download_process/16

Mengenal TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Pengadaan Barang/Jasa di Desa, diakses Mei 4, 2025, <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/tpk-tim-pelaksana-kegiatan/>

tata cara pengadaan barang jasa di desa - BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, diakses Mei 4, 2025, <https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/10/TATA-CARA-PENGADAAN-BARANG-JASA-DI-DESA FINAL.pdf>

Peraturan Bupati Bogor Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa B, diakses Mei 4, 2025, <https://jdih.bogorkab.go.id/peraturan/perda/download/>

- Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 *Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa*, diakses Mei 4, 2025, <https://jdih.magelangkab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati/51/2023>
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, diakses Mei 4, 2025, <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/view/peraturan-bupati-kabupaten-gresik/peraturan-bupati-gresik-nomor-52-tahun-2021-tentang-tata-cara-pengadaan-barangjasa-di-desa-1641792890>
- Lampiran Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2019 Tentang *Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa*, diakses Mei 4, 2025, <https://jdih.paserkab.go.id/assets/library/document/lampiran-perbup-nomor-48-tentang-tata-cara-pengadaan-barangjasa-di-desa.pdf>
- Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang *Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa*, diakses Mei 4, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/151343/PERBUP%20No.%2012%20Tahun%202020%20tentang%20Tata%20Cara%20Pengadaan%20Barang%20Jasa%20Di%20Desa.pdf>
- bupati hulu sungai selatan - Salinan, diakses Mei 4, 2025, <https://jdih.hulusungaiselatankab.go.id/dokumen/download?id=646>
- Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah - Kedesas.id, diakses Mei 4, 2025, https://kedesas.id/id_ID/wiki/pembinaan-dan-pengawasan/
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah* (Berita - Peraturan BPK, diakses Mei 4, 2025,

- <https://peraturan.bpk.go.id/Download/306158/8.1.%20P%20erbu%20No%2048%20Th%202022%20-%20Pembinaan%20dan%20Pengawasan%20Terhadap%20Perangkat%20Daerah%20dan%20Desa.pdf>
- Lembaga Kebijakan - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Temanku LKPP*, diakses Mei 4, 2025, https://temanku.lkpp.go.id/media/docs/docs_60f136696555f.pdf
- Tugas TPK Dalam Keuangan Desa - Desa Bolano*, diakses Mei 4, 2025, <https://www.bolano.parimo.id/artikel/2022/9/4/tugas-tpk-dalam-keuangan-desa#!>
- Konsep Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa*, diakses Mei 4, 2025, <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/download/152/164/961>
- Eliminasi Kesenjangan Kualitas SDM Melalui Kebijakan Afirmasi Pendidikan di Jawa Timur Eliminating Human Resource Disparity Thro*, diakses Mei 4, 2025, <https://e-journal.unair.ac.id/JAP/article/download/23300/12717/89681>
- Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Sandang Pangan Kecamatan - Jurnal Adptersi*, diakses Mei 4, 2025, <https://jurnal.adptersi.or.id/index.php/JTCSA/article/download/200/148>
- [standar operasional prosedur (sop) sekretariat dprd kabupaten kutai kartanegara] 2020, diakses Mei 4, 2025, <https://www.dprdkutaiartanegara.go.id/download/SOP-DPRD-2020.pdf>
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa*, diakses Mei 4, 2025, <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/download/36/26>
- SOP Pemerintah Desa | PDF - Scribd, diakses Mei 4, 2025, <https://id.scribd.com/document/504483756/SOP->

Pemerintah-desa

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Desa Lubuk Lawas, diakses Mei 4, 2025, <https://lubuklawas.desa.id/artikel/2023/08/25/standar-operasional-prosedur-sop-di-lingkungan-pemerintah-desa-lubuk-lawas>

Perkades sop pakta integritas - Pandemulyo Bulu - Pemerintah Kabupaten Temanggung, diakses Mei 4, 2025, https://pandemulyo-bulu.temanggungkab.go.id/assets/dok_file/40_1724819884.pdf

Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Sop Pada Penerbit Di Surabaya - Universitas PGRI Pontianak, diakses Mei 4, 2025, <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/gervasi/article/download/4561/2174>

Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Sandang Pangan Kecamatan - Jurnal Adpertisi, diakses Mei 4, 2025, <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JTCSA/article/download/200/148/418>

Pendampingan dalam Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Program Accurate dalam Pencatatan Penjualan kepada Ka, diakses Mei 4, 2025, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/1281/511/3865>

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman - DPMPD Kaltim, diakses Mei 4, 2025, <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/permendagri-no-114-tentang-pedoman-pembangunan-desa>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa, diakses Mei 4, 2025, https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/download/Permendagri%20no%20114%20thn%202014%20Tentang%20Pedoman%20Pembangunan%20Desa_953213.pdf

MODUL - Website UKPBJ Kabupaten Poso, diakses Mei 4, 2025,
https://bpbj.posokab.go.id/public/deploy/pdf/1680572353_f3db2c260f3fe0609bc4.pdf

melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah level 2, diakses Mei 4, 2025,
https://biroapbj.jatengprov.go.id/public/upload/files/Melakukan_Perencanaan_PBJP_-_Narsum_IAP1.pdf

rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi pemerinitah provinsilampung tahun 2023-2024 area 1: perencanaan dan penganggaran - Inspektorat Provinsi Lampung, diakses Mei 4, 2025,
<https://inspektorat.lampungprov.go.id/berkas/uploads/V1V6cJrBP1tmBOSs16qfxC74Pu2jtwcQSJKlx3Jh.pdf>

PEDOMAN PENILAIAN - Inspektorat Kabupaten Grobogan, diakses Mei 4, 2025,
https://inspektorat.grobogan.go.id/images/Berita/Rakor_MCP_9_Maret_2023/Pedoman_Penilaian_MCP_2023.pdf

diakses Januari 1, 1970, url_sop2_source1

diakses Januari 1, 1970, url_sop2_source2

diakses Januari 1, 1970, placeholder_url_template_sop2_3_v2

surat perintah kerja (SPK), diakses Mei 4, 2025,
http://lpse.kuansing.go.id/eproc4/public/documents/surat_perintah_kerja.pdf

contoh : surat perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa, diakses Mei 4, 2025,
<https://dinpermades.temanggungkab.go.id/frontend/downloadDoc/1447>

jdih.lkpp.go.id, diakses Mei 4, 2025,
<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/keputusan-deputi-i-nomor-1-tahun-2025/1>

diakses Januari 1, 1970, url_sop3_source1

diakses Januari 1, 1970, url_sop3_source2

diakses Januari 1, 1970, placeholder_url_form_sop4_5_6

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Www.Diklat.Net I. Pendahuluan
Bahwa sebagaimana, diakses Mei 4, 2025,

https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/pengaturan-mengenai-tata-cara-pengadaan-barang-jasa-di-desa_edit-binbangkum.pdf
diakses Januari 1, 1970, placeholder_url_negotiation_tips
diakses Januari 1, 1970, placeholder_url_form_sop7
Contoh Format Formulir Perencanaan Pengadaan - JDIH Kota Pasuruan, diakses Mei 4, 2025,
https://jdih.pasuruankota.go.id/_upload/produk_hukum/Peraturan%20Walikota/lampiran/2022/lampiran-petunjuk-teknis-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-kota-pasuruan.pdf
Serah Terima Hasil Pekerjaan - WordPress.com, diakses Mei 4, 2025,
<https://fakpi929458947.files.wordpress.com/2019/10/workshop-3-serah-terima-hasil-pekerjaan.pdf>
diakses Januari 1, 1970, placeholder_url_form_sop8
Formulir Pengajuan Pembayaran JHT | PDF - Scribd, diakses Mei 4, 2025,
<https://fr.scribd.com/document/478326217/Formulir-Pengajuan-Pembayaran-JHT-docx>
Formulir 4 Bpjs Ketenagakerjaan (Klaim Jaminan Kematian) | PDF - Scribd, diakses Mei 4, 2025,
<https://id.scribd.com/document/531933327/Formulir-4-Bpjs-Ketenagakerjaan-Klaim-Jaminan-Kematian>
15122015 145841 formulir beasiswa | PDF - SlideShare, diakses Mei 4, 2025,
<https://www.slideshare.net/alfalailah/15122015-145841-formulir-beasiswa>
diakses Januari 1, 1970, placeholder_url_form_sop9
diakses Januari 1, 1970, placeholder_url_form_sop10
Analisis Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Menggunakan Metode E-Procurement - PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH, diakses Mei 4, 2025,
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/download/887/765/3407>



Profil Penulis



Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Agus Arif Rakhman adalah Pengelola Pengadaan Ahli Madya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan nasional. Keahliannya yang mendalam dalam bidang ini diakui melalui perannya sebagai Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Sebagai Probitry Advisor LKPP RI, Agus memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan transparansi proses pengadaan di tingkat nasional. Pengalamannya yang luas mencakup penyusunan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan model dokumen pengadaan, yang telah menjadi acuan penting dalam standardisasi proses pengadaan di berbagai instansi pemerintah.

Agus juga dikenal sebagai penulis produktif dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Buku-bukunya telah menjadi sumber referensi yang berharga bagi praktisi dan akademisi di seluruh Indonesia. Kontribusinya dalam tim penyusun peraturan LKPP semakin memperkuat perannya sebagai tokoh kunci dalam membentuk kebijakan pengadaan di tingkat nasional.

Dengan kombinasi unik antara keahlian teknis, pengalaman praktis, dan kemampuan menulis, Agus Arif Rakhman terus berdedikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Karyanya tidak hanya membentuk praktik terbaik saat ini, tetapi juga menginspirasi generasi mendatang dari para profesional pengadaan.



Myrtaferae Kananga, SE., M.AP., CCMS. Myrtaferae Kananga adalah seorang praktisi dan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah yang telah mengabdikan karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. [cite_start]Saat ini, beliau memegang jabatan strategis sebagai *Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Ahli Madya* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Dedikasinya yang mendalam pada tata kelola pengadaan

yang akuntabel tercermin dari rekam jejaknya yang komprehensif, memadukan landasan akademis yang kuat dengan pengalaman praktis dan sertifikasi keahlian yang berkelanjutan.

Fondasi keilmuan beliau dibangun dari latar belakang pendidikan formal yang relevan, yaitu Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Udayana, Bali (lulus 2005) dan Magister Administrasi Publik (M.AP) dari Universitas Terbuka (lulus 2019). Perpaduan disiplin ilmu ekonomi dan administrasi publik ini memberikan beliau perspektif yang unik dalam memahami pengadaan barang/jasa tidak hanya sebagai proses transaksional, tetapi juga sebagai instrumen krusial dalam manajemen keuangan negara dan pelayanan publik.

Perjalanan profesional Myrtaferae Kananga di dunia pengadaan ditandai oleh komitmennya pada pengembangan kompetensi secara terstruktur dan progresif. Dimulai dengan meraih Sertifikasi Ahli Pengadaan tingkat dasar pada tahun 2015, beliau secara konsisten meningkatkan keahliannya melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jenjang karirnya sebagai fungsional PPBJ terus menanjak, mulai dari pembentukan jabatan fungsional pada tahun 2017, meraih kualifikasi Ahli Muda pada tahun 2019, hingga puncaknya mencapai jenjang *Ahli Madya* pada tahun 2022 dan 2023.

Untuk mempertajam keahliannya, beliau juga melengkapi diri dengan berbagai sertifikasi spesialis yang sangat relevan dengan tantangan pengadaan modern. Di antaranya adalah sertifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C, pelatihan Katalog Elektronik, dan Pelatihan PBJ di Desa. Puncak dari spesialisasi ini adalah keberhasilannya meraih sertifikasi prestisius sebagai *Certified Contract Management Specialist (CCMS)* dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tahun 2024, yang menegaskan otoritasnya dalam manajemen kontrak pengadaan.

Keahlian teoritis dan sertifikasi yang dimiliki beliau teruji secara nyata di lapangan melalui berbagai pengalaman kerja yang signifikan. Beliau telah bertindak sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*, sebuah peran yang menuntut tanggung jawab tinggi dalam eksekusi anggaran. Selain itu, pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai Anggota hingga **Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan* di tingkat Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuktikan kapasitas kepemimpinan dan kemampuannya dalam mengelola proses pemilihan penyedia yang kompleks dan bernilai strategis.

Reputasi dan keahliannya tidak hanya diakui di lingkungan kerja, tetapi juga di kalangan komunitas pengadaan yang lebih luas. Beliau aktif diundang sebagai *Narasumber* dan *Moderator* dalam berbagai bimbingan teknis dan webinar yang membahas topik-topik krusial seperti e-Katalog, pengendalian kontrak konstruksi, dan implementasi perencanaan pengadaan. Secara khusus, keterlibatannya sebagai narasumber dalam pelatihan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan pemahamannya yang mendalam terhadap ekosistem pengadaan di tingkat desa. Kombinasi inilah yang menjadikan Myrtaferae Kananga figur yang sangat kredibel dan tepat untuk mengupas tuntas seluk-beluk pengadaan desa dalam buku ini.